

**Judul** : Gaji Guru dan Dosen rendah, pemerintah bisa ambil tanggung jawab penuh  
**Tanggal** : Minggu, 10 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Gaji Guru Dan Dosen Rendah

## Pemerintah Bisa Ambil Tanggung Jawab Penuh

SENAYAN berharap negara bertanggung jawab penuh atas gaji dan kesejahteraan guru, terutama mereka yang mengabdikan diri di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri (PTN). Pasalnya, gaji guru di Indonesia masih jauh dari layak jika dibandingkan dengan negara lain.

Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly (Amure) mengatakan, guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun, kesejahteraan mereka belum maksimal. "Ini menunjukkan kita masih harus berbenah dalam penghargaan terhadap profesi guru," ujar Amure, Sabtu (9/8/2025).

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyoroti anggapan di media sosial bahwa profesi dosen dan guru kurang dihargai karena gajinya kecil, yang menjadi tantangan bagi keuangan negara. Ia mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan harus berasal dari negara atau

bisa melibatkan partisipasi masyarakat.

Amure menegaskan, bila gaji guru masih dibebankan kepada masyarakat, tidak ada bedanya dengan sekolah swasta. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN 2025 atau Rp724,3 triliun seharusnya cukup untuk memberikan gaji layak bagi guru dan dosen, asalkan dikelola secara akuntabel.

Ia menambahkan, kemajuan pendidikan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan guru, sehingga pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus berkomitmen meningkatkannya. "Jika dana pendidikan dikelola dengan baik, kesejahteraan guru bisa terpenuhi," ujarnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, kecilnya gaji guru menjadi pengingat bahwa pembiayaan pendidikan membutuhkan komitmen besar, terutama dari negara.



Andi Muawiyah Ramly

Pemerintah sudah memberi berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, tunjangan khu-

sus wilayah 3T, dan tunjangan kehormatan dosen. Namun, distribusi dan efektivitasnya masih

menjadi tantangan sehingga kesejahteraan belum merata.

"Kita perlu mengembangkan model pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat dan swasta, disertai regulasi yang menjaga mutu dan pemerataan," ujarnya.

Hetifah menegaskan, Komisi X DPR akan mengawal agar alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan digunakan efektif demi meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, tanpa mengorbankan prioritas lain seperti kualitas pembelajaran dan infrastruktur.

Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024, rata-rata gaji guru ASN golongan III berkisar Rp 4-7 juta per bulan. Guru honorer bisa jauh di bawah itu, bahkan di bawah UMR. Guru non-ASN bersertifikat mendapat tunjangan penghasilan guru (TPG) Rp 2 juta per bulan, sementara guru ASN mendapat TPG setara gaji pokok per bulan. ■ TIF